



***Power Relations in Partnership Practices in the Education Sector:
Case Study of State Vocational High School 2 Yogyakarta.***

**Relasi Kuasa Dalam Praktik Kemitraan Di Sektor Pendidikan:
Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta**

Mochammad Fatkhurrohman^a, Fandi Rizki Rosyari^b

^aMahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM

^bPusat Kajian Daerah dan Anggaran, Sekretariat Jenderal DPD RI

^aSleman, Yogyakarta, Indonesia

^bJakarta, DKI Jakarta, Indonesia

^amochammadfatur27@gmail.com, ^brosyarifandirizki@gmail.com

Abstract

This research aims to see the power relations between the school, industry and society or students in the practice of partnerships in the education sector. The partnership seeks to involve the community, both in groups and individually. In a partnership there is a relationship between organizations and with that relationship cooperation will be created. Each of these actors has varying interests, expertise, resources and decision-making abilities. Therefore, it is very interesting to see how the negotiation process takes place between actors. Whether each actor managed to get his interests. This research is a descriptive qualitative research using a case study approach. In this study, researchers will develop concepts and gather facts that can answer questions in the formulation of the problem by looking at the rationality of each actor involved in the practice of partnership in SMKN 2 Yogyakarta. Researchers will use in-depth interviews with several informants to obtain accurate data. The results of this study are both the school, industry and society or students have rationality in undergoing this partnership. They use the rationality in the negotiation process to determine the types of partnerships. Although each actor has succeeded in fulfilling his interests, in reality there are still actors who get greater benefits. This shows the dominant pattern of relations. There are two things that led to the emergence of the relation pattern, the rules made by the Government and the resources owned by each actor offered during the negotiation process.

Keywords: *Partnership, Power Relations, Rationality*

Abstrak

Penelitian ini hendak melihat relasi kuasa antara pihak sekolah, dunia industri dan masyarakat atau siswa dalam praktik kemitraan di sektor pendidikan. Kemitraan berusaha melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk kelompok maupun individual. Dalam kemitraan terjadi relasi antarorganisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan, keahlian, sumberdaya dan kemampuan pengambilan keputusan yang bervariasi. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk melihat bagaimana proses negosiasi yang berlangsung antar aktor. Apakah masing-masing aktor berhasil mendapatkan kepentingannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dengan cara melihat rasionalitas masing-masing aktor yang terlibat dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam atau *indepth interview* ke beberapa informan guna mendapatkan data yang akurat. Hasil penelitian ini adalah baik pihak sekolah, dunia industri maupun masyarakat atau siswa memiliki rasionalitas dalam menjalani kemitraan ini. Rasionalitas tersebut mereka gunakan dalam proses negosiasi untuk penentuan jenis-jenis kemitraan. Walaupun masing-masing aktor berhasil memenuhi kepentingannya, namun nyatanya masih ada aktor yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan pola relasi yang dominatif. Ada dua hal yang menyebabkan munculnya pola relasi tersebut yaitu aturan yang dibuat Pemerintah dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang ditawarkan saat proses negosiasi.

Kata Kunci: Kemitraan, Relasi Kuasa, Rasionalitas.

PENDAHULUAN

Istilah kemitraan seringkali dipertukarkan dengan banyak istilah lain seperti kolaborasi, aliansi, ko-produksi atau konsorsium. Istilah-istilah ini sebenarnya merupakan perwujudan dari kerja sama antar individu atau kelompok yang saling membantu, saling menguntungkan dan secara bersama-sama meringankan pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Pengertian kemitraan mengacu kepada dukungan sukarela dan resiprokal (timbal balik) antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Dengan kata lain antara badan publik dengan privat, termasuk organisasi *nonprofit*, saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah (Fatmawati, 2011).

Dalam kemitraan terjadi relasi antarorganisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama (Fatmawati, 2011). Kemitraan berusaha melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk kelompok maupun individual. Vidoga dalam Fatmawati (2011) menyebut mereka sebagai "*social players*" yang memiliki tingkatan kepentingan, keahlian, sumberdaya dan kemampuan pengambilan keputusan yang bervariasi. Vigoda menyoroiti kondisi ideal dari proses kemitraan, dimana masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penanggung jawab pemerintahan bertindak sebagai sepasang "*partner*" dalam proses pengambilan keputusan (Fatmawati, 2011).

Perlahan-lahan kemitraan yang tadinya hanya berlangsung pada bidang

pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi mulai memasuki bidang sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Masuknya kemitraan pada bidang pendidikan semakin mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan. Kemitraan tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/industri. Ketiga aktor tersebut bersama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama.

Namun di sinilah proses yang cukup rumit, selain proses pelaksanaannya. Pada proses ini masing-masing pihak memilah mana kebutuhan yang bisa diarahkan kepada tujuan dan manfaat bersama. Maka bukan tidak mungkin pada proses ini seringkali terjadi konflik kepentingan antar masing-masing pihak, sehingga membutuhkan proses negosiasi agar kemudian konflik kepentingan yang ada tidak terlalu dalam. Salah satu contoh konflik kepentingan pada kemitraan dalam pendidikan adalah perbedaan tujuan.

Menurut Purnanto dan Imron (2012) perbedaan tujuan tersebut merupakan sebuah konflik dan pihak sekolah harus melakukan pendekatan yang baik dan mendiskusikannya bersama dengan dunia usaha/industri. Konflik kepentingan tersebut nantinya dapat menyebabkan sebuah relasi yang tidak seimbang dalam kemitraan. Hari ini semua pendidikan kejuruan menjalankan praktik kemitraan tersebut. Begitu juga dengan SMKN 2 Yogyakarta. Dalam menjalankan praktik kemitraannya, SMKN 2 Yogyakarta banyak bekerja sama dengan masyarakat dan industri-industri yang berskala kecil dan besar.

Ada tiga aktor yang terlibat dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta, yaitu Pemerintah yang diwakili oleh SMKN 2 Yogyakarta dan beberapa jurusan yang ada, Dunia Industri yang diwakili oleh PT Krama Yudha Berlian (anak perusahaan Mitsubishi) dan PT. YPTI, serta masyarakat yang diwakili oleh siswa. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan kemitraan ini. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya pasti saling berbenturan satu sama lain.

Oleh sebab itu, sangat menarik untuk melihat bagaimana proses negosiasi yang berlangsung antar aktor. Karena masing-masing aktor ternyata saling membutuhkan satu sama lain dan pihak sekolah tentunya menghindari konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Begitu juga dengan dunia industri serta siswa SMKN 2 Yogyakarta. Namun pertanyaannya apakah proses negosiasi tersebut berjalan dengan baik ? sehingga masing-masing aktor berhasil mendapatkan kepentingannya. Atau yang terjadi malah sebaliknya ? dimana hanya salah satu aktor saja yang berhasil

mendapatkan keuntungan, sementara aktor lainnya mengalami kerugian. Hal itu memperlihatkan bahwa proses negosiasi tersebut akan menunjukkan bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta.

Maka untuk melihat kepentingan masing-masing aktor, tulisan ini menggunakan teori pilihan rasional. Ketiga aktor tersebut selalu bertindak berdasarkan oleh setiap rasionalitas yang berasal dari preferensi, yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan mengarah pada pencapaian kepentingan individu tersebut (Deliarnov, 2006). Itu lah yang menjadi dasar dari teori pilihan rasional. Menurut Hindmoor (dalam Sukmajati, 2014), bahwa seorang aktor politik akan memilih sebuah tindakan yang didasarkan pada hierarki dari preferensi yang menjanjikan pada maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi biaya untuk kepentingan diri. Teori ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana masing-masing aktor dalam bernegosiasi akan melakukan perhitungan yang mengarah keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal.

Sementara untuk melihat relasi kuasa yang terjadi akibat dari proses negosiasi yang telah berlangsung, peneliti akan menggunakan konsep relasi kuasa Foucault. Secara garis besar relasi kuasa didefinisikan oleh Foucault (dalam Sulistiya dkk., 2011) sebagai sesuatu yang membuat patuh. Menurutnya kekuasaan tidak selalu didapat dari cara-cara represif, melainkan secara manipulatif dan hegemonik (Anggraeny, 2017). Oleh sebab itu bagi Foucault kekuasaan merupakan satu dimensi dari sebuah relasi. Sehingga dapat diartikan dalam sebuah relasi akan diikuti sertakan dengan kekuasaan. Secara normal relasi kuasa dapat berlangsung secara fungsional-simbiotik. Artinya keduanya memiliki relasi saling menguntungkan. Namun pada banyak kasus tidak selamanya bisa berlangsung positif, akan tetapi negative berupa pola relasi eksploitatif dan dominatif. Pola relasi tersebut hanya menguntungkan satu pihak yaitu penguasa, sedangkan pihak lainnya kurang diuntungkan bahkan ditindas hanya untuk melayani kepentingan kekuasaan (Rohman dkk., 2014).

Dalam beberapa studi tentang kekuasaan khususnya relasi kuasa antar aktor, masih sedikit yang memfokuskan pada relasi kuasa pada praktik kemitraan khususnya kemitraan dalam pendidikan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan belum bertujuan untuk memfokuskan pada hal tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Romina De Angelis (2014) yang berjudul *Quality In India Education : Public-Private Partnership and Grant-In-Aid-Schols* dan O.A Thomas dan A.S Thomas-Olufluwa (2013) yang berjudul *Public-Private Partnership And Management Of Higher Education In Nigeria* memfokuskan pada praktik kemitraan di sektor pendidikan hanya

memfokuskan diri pada perbandingan kualitas pendidikan yang dihasilkan dari pendidikan dengan cara kemitraan dan non-kemitraan.

Sementara itu penelitian Shailaja Fennel (2007) yang berjudul *Tilting at Windmills: Public-Private Partnership in Indian Education Today* dan R. Paul Battaglio, Jr. dan Ghassan A. Khankarli (2008) yang berjudul *Toll Road, Politics, and Public-Public Partnership (The Case of Texas State Highway 121)* yang menggunakan perspektif politik dalam praktik kemitraan dimana fokusnya hanya pada distribusi kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan peran kekuasaan masyarakat dalam merubah sebuah kebijakan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Antoni Verger (2012) yang berjudul *Framming And Selling Global Education Policy: The Promotion Of Public-Private Partnership For Education In Low-Income Contexts* hanya menunjukkan begitu kuatnya kekuasaan jaringan internasional dalam mewacanakan dan mempromosikan kemitraan di sektor pendidikan melalui strategi semiotiknya. Melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah keilmuan tentang kekuasaan khususnya relasi kuasa antar aktor pada praktik kemitraan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dengan cara melihat rasionalitas masing-masing aktor yang terlibat dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam atau *indepth interview* ke beberapa informan guna mendapatkan data yang akurat. Selain itu juga peneliti menggunakan metode dokumentasi serta melakukan observasi langsung di SMKN 2 Yogyakarta dan beberapa industri yang bermitra dengan SMKN 2 Yogyakarta untuk memperoleh data lebih lengkap agar dapat dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pendidikan, wacana PPP mulai muncul antara tahun 1980 dan 1990an. Pada saat itu beberapa lembaga donor seperti Bank Dunia dan IMF sedang menerapkan privatisasi pendidikan khususnya pada negara-negara yang berpenghasilan rendah. Semua itu dilakukan untuk satu tujuan yaitu penyesuaian

struktural. Namun hasilnya adalah masyarakat merasakan dampak negative dari hal tersebut. Belajar dari kegagalan tersebut, lembaga donor menyadari bahwa privatisasi radikal tidak bisa diterapkan pada bidang pendidikan. (Verger, 2012).

Oleh sebab itu perlu mengganti konsep tersebut dengan konsep yang baru yaitu kemitraan antara sektor publik dengan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) dalam pendidikan. Salah satu alasan kuat yang diberikan oleh lembaga donor mengenai perlunya penerapan PPP dalam pendidikan adalah bahwa pemerintah tidak bisa menghadapi perluasan pendidikan oleh mereka sendiri. Sehingga diperlukan mitra untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan tersebut. (Verger, 2012).

Dengan dikembangkannya konsep PPP dalam pendidikan, maka menurut OECD perlu adanya pendefinisian ulang peran sektor publik dan swasta dalam pemberian layanan pendidikan (OECD dalam Education International, 2009). Namun pendefinisian tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Nyatanya Education International (2009) menjelaskan bahwa para pendukung dan kritikus PPP menyetujui konsep PPP yang fleksibel yaitu interaksi publik dan swasta dalam memberikan layanan. Sehingga sangat wajar apabila definisi PPP sangat beragam.

Keberagaman definisi tersebut menyebabkan kelonggaran pelaksanaan PPP dalam pendidikan. Sehingga dalam praktiknya, PPP di sektor pendidikan sering disamakan dengan PPP untuk pembangunan infrastruktur. Dan itu terjadi sampai tahap yang paling teknis. Hal tersebut terjadi, lantaran PPP merupakan sebuah strategi alternatif dalam memberikan layanan publik khususnya dalam bidang pendidikan. Secara garis besar prinsip desentralisasilah yang kemudian membuka peluang partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Prinsip tersebut memberikan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kepada pihak swasta dalam hal pemberian layanan publik kepada masyarakat. Bahkan hampir di semua sektor pelayanan publik prinsip tersebut diterapkan. Begitu juga dengan sektor pendidikan. Menurut Dave Hill dalam Putra (2010) desentralisasi adalah upaya memperkecil tanggung jawab pemerintah pusat agar pemerintah provinsi/regional dan sektor privat terlibat atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik seperti pendidikan.

Dalam PPP di sektor pendidikan ada tiga aktor utama yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia industri. Di dalam pemerintah terbagi beberapa aktor seperti pemerintah pusat dan provinsi, dinas pendidikan provinsi dan sekolah. Sementara masyarakat diwakili oleh komite sekolah dan siswa. Dan pihak swasta atau

dunia industri diwakili oleh beberapa perusahaan yang menjalin kemitraan dengan pihak sekolah.

Di Indonesia sendiri, PPP dalam pendidikan disebabkan oleh dua kebijakan, yaitu kebijakan *Link and Match* dan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (selanjutnya disebut PSG). Munculnya kebijakan *Link and Match* dan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ini, selaras dengan mulai diterapkannya pelaksanaan PPP atau kemitraan di Indonesia pada tahun 1990-an dan nyatanya beberapa proyek pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berhasil dibangun dengan model PPP atau kemitraan ini. Selain itu, menurut Kuntoro (2010) dalam kehidupan modern peran pendidikan khususnya sekolah lebih diarahkan dan dikaitkan dengan ekonomi dan hampir semua pemerintah mengakui bahwa sekolah harus dapat menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan berketerampilan yang dibutuhkan bagi pencapaian kemajuan dan peningkatan ekonomi baik bagi peserta didik atau masyarakat, negara dan dunia industri.

Perkembangan dan Praktik Kemitraan Di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Yogyakarta

Ada dua proses yang dilalui oleh SMKN 2 Yogyakarta dalam menjalankan kemitraan dengan dunia industri yaitu mengenal ide dasar dan adaptasi sekaligus pelaksanaan kemitraan. SMKN 2 Yogyakarta mengenal ide dasar tentang kerja sama atau PPP dengan dunia industri dari peraturan yang dibuat pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut dunia industri harus lebih proaktif dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak sekolah. Kemitraan yang diterapkan pada SMKN 2 Yogyakarta diawali oleh program *Link and Match* yang dibuat oleh pemerintah pusat¹.

Proses selanjutnya adalah adaptasi ide-ide dasar PPP di sektor pendidikan pada SMKN 2 Yogyakarta. Hal tersebut dapat kita lihat dari kesiapan sekolah dalam penyesuaian lingkungan belajar, pekerjaan seluruh tenaga kependidikan sekolah dan pelajaran yang diajarkan ke murid. Penyesuaian lingkungan belajar terlihat dari kesamaan beberapa bengkel atau tempat praktik siswa di sekolah dengan perusahaan yang menjadi mitra mereka. Adaptasi selanjutnya adalah penyesuaian pekerjaan tenaga kependidikan di SMKN 2 Yogyakarta. Penyesuaian yang dilakukan untuk guru-guru yang mengajar di SMKN 2 Yogyakarta melalui program *On The Job Training* (OJT) guru. Selain program tersebut, guru-guru juga menjalankan kurikulum yang telah

¹ Wawancara dengan Pak Arif, Kajur Teknik Audio dan Video SMKN 2 Yogyakarta, 23/9/2018, di SMKN 2 Yogyakarta.

disesuaikan dengan konten industri. Dan adaptasi yang terakhir adalah penyesuaian pelajaran.

Penyesuaian ini dijalankan oleh siswa baik di kelas ataupun di bengkel. Di kelas dengan guru tamu dari pihak industri dan guru sekolah yang kompetensinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan di bengkel dengan peralatan yang sesuai dengan alat-alat yang ada di industri. Tentunya proses belajar tersebut menggunakan kurikulum yang telah disesuaikan dengan konten kurikulum milik industri. Tetapi penyesuaian pelajaran ini diperdalam oleh siswa melalui kegiatan PKL atau magang.

Secara garis besar ada beberapa program kerja sama yang dijalankan oleh SMK Negeri 2 Yogyakarta dengan dunia industri, seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa, magang siswa, guru tamu dari pihak swasta, *On The Job Training* (OJT) guru, recruitmen tenaga kerja, sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri dan bantuan sarana dan prasarana². Untuk program PKL siswa, magang siswa dan OJT guru biasanya difasilitasi oleh pihak swasta yang bermitra dengan SMKN 2 Yogyakarta. PKL dan magang siswa merupakan implementasi pengetahuan yang di miliki oleh siswa.

Program OJT guru biasanya dilaksanakan pada tempat pelatihan yang disediakan oleh industri. Tetapi program ini tidak dijalankan pada semua industri yang menjadi tempat PKL atau magang siswa. Biasanya pelaksanaan progam ini harus pada industri yang berskala besar. Karena program ini memiliki kaitan dengan sinkronisasi kurikulum. Umumnya penyesuaian kurikulum ini dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan besar saja.

Salah dua perusahaan yang menjalankan kerja sama jenis ini dengan pihak SMKN 2 Yogyakarta adalah Mitshubishi Adisucipto yang bekerja sama dengan Jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan PT.YPTI yang bekerja sama dengan Jurusan Teknik Mesin³. Proses penyesuaian kerja sama ini dilaksanakan pada workshop penyesuaian kejuruan. Di workshop tersebut pihak jurusan mengundang beberapa pihak terkait seperti Dikpora Provinsi, pengawas dari pihak jurusan dan pihak industri. Proses ini berjalan dengan cara membandingkan konten kurikulum yang di miliki pihak jurusan dengan kebutuhan dari pihak industri.

Untuk program guru tamu dari pihak industri biasanya industri mengutus salah satu anggota atau karyawan perusahaan untuk mengajar di SMKN 2 Yogyakarta.

² Wawancara dengan Pak Eka, perwakilan Humas SMKN 2 Yogyakarta, 18/9/2018, di SMKN 2 Yogyakarta.

³ Wawancara dengan Pak Maryuwono, Kajar Teknik Mesin SMK Negeri 2 Yogyakarta, 28/9/2018, di SMKN 2 Yogyakarta

Program kemitraan lainnya adalah recruitmen tenaga kerja. Untuk program ini baik SMKN 2 Yogyakarta dan pihak industri biasanya sama-sama saling menjemput bola. Artinya terkadang pihak sekolah yang mengunjungi pihak industri, atau sebaliknya yaitu dunia industri yang mengunjungi pihak sekolah.

Selanjutnya ada program kunjungan industri. Jenis kemitraan ini dilaksanakan dengan cara pihak sekolah bersama siswa mendatangi salah satu perusahaan. Biasanya kunjungan industri ini juga dijadikan awal untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak industri. Untuk program kemitraan terakhir yang terakhir adalah bantuan sarana dan prasarana. Jenis kemitraan ini dalam praktiknya hampir mirip dengan penyesuaian atau sinkronisasi kurikulum, yaitu perusahaan yang bekerja sama hampir rata-rata perusahaan berskala besar. Jenis-jenis kemitraan tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan di satu industri, oleh sebab itu penentuan jenis kemitraan mana yang akan dijalankan tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak. Seperti kerja sama yang dijalin antara jurusan Teknik Mesin dengan PT YPTI yang hanya menjalankan PKL dan magang siswa, sinkronisasi kurikulum, OJT guru dan guru tamu dari pihak industri.

Dalam menjalin kemitraan dengan pihak industri, SMKN 2 Yogyakarta yang diwakili oleh Humas biasanya hanya sebagai fasilitator saja. Dan pihak jurusan lah yang memegang peranan utama dalam praktik kemitraan ini⁴. Oleh sebab itu sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing jurusan sangat mempengaruhi beberapa program kemitraan yang dijalankan. Seperti misalnya program sinkronisasi kurikulum, bantuan sarana dan prasarana serta program magang siswa. Ketiga program tersebut menuntut masing-masing jurusan untuk memiliki sumber daya yang lebih. Apabila mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka mereka tidak bisa merasakan manfaat dari program-program tersebut.

Proses Negosiasi dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Kemitraan Di SMKN 2 Yogyakarta

Dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta aktor-aktor yang melakukan negosiasi adalah humas sekolah, ketua jurusan, perwakilan dunia industri yaitu PT. YPTI dan PT Krama Yudha Berlian (anak perusahaan Mitshubishi) serta siswa. Dalam bernegosiasi masing-masing aktor mempertimbangkan keuntungan maksimal dan meminimalisir kerugian. Sehingga saat mereka saling bertemu untuk bernegosiasi,

⁴ *Op.cit*, Pak Arif, 23/9/2018.

masing-masing menawarkan sesuatu baik itu yang berbentuk materiil atau non-materiil yang bisa digunakan sebagai bahan pertukaran. Seperti misalnya pihak sekolah menawarkan guru, siswa dan kurikulum. Pihak sekolah percaya bahwa ketiga hal tersebut diperlukan oleh dunia industri untuk memenuhi kebutuhannya serta sebagai sebuah usaha untuk memperoleh kepercayaan dari dunia industri dan masyarakat.

Hampir sama dengan pihak sekolah, dunia industri juga menawarkan beberapa hal dalam bernegosiasi seperti penyediaan fasilitas pelatihan untuk guru dan murid serta tentor untuk melatih siswa baik di perusahaan atau di sekolah dan alat praktik seperti mesin yang akan digunakan sebagai bahan ajar siswa. Pihak industri menganggap bahwa tawaran yang mereka berikan sebagai sebuah investasi, khususnya dalam hal pelatihan guru. Para guru yang telah menjalani pelatihan dari dunia industri serta kurikulum yang sudah disesuaikan, bisa sangat membantu mereka dalam menerapkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri kepada para siswa.

Sementara itu, tidak saja pihak sekolah dan dunia industri saja yang saling memberikan tawaran selama proses negosiasi. Siswa yang menjadi bagian dari masyarakat pun juga melakukannya. Dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta, siswa menawarkan uang dan waktu. Para siswa percaya bahwa biaya yang mereka keluarkan akan sesuai dengan manfaat yang mereka dapatkan, yaitu dapat meningkatkan kompetensi mereka, agar kemudian bisa langsung bekerja setelah mereka lulus. Masing-masing penawaran tersebut bisa dikatakan merupakan sebuah rasionalitas masing-masing aktor. Hal itu menunjukkan bahwa kemitraan yang ada di SMKN 2 Yogyakarta tidak sekedar berjalan atas aturan yang dibuat oleh pemerintah. Melainkan juga berjalan di atas rasionalitas para aktor agar mencapai kepentingan masing-masing. Tetapi, proses utama dalam mencapai kepentingan itu adalah negosiasi yang berlangsung di antara mereka.

Proses negosiasi dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta berlangsung pada saat penentuan jenis-jenis kemitraan yang akan dijalankan. Penentuan tersebut dijalankan melalui interaksi langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung terjadi ketika pihak sekolah atau jurusan mendatangi pihak industri atau sebaliknya yaitu pihak industri mendatangi sekolah. Sementara interaksi tidak langsung adalah interaksi antara kedua pihak yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kementerian. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin “kita mendapat undangan dari pihak kementerian industri. Dalam kegiatan tersebut pihak industri (PT. YPTI) dan beberapa sekolah diundang, lalu diberikan arahan oleh kementerian. Setelah itu pihak industri

mengundang sekolah-sekolah yang menjadi binaannya dan menjelaskan langkah-langkah serta program-program yang akan dijalankan⁵. Kedua interaksi tersebut dilakukan untuk membuat sebuah kesepakatan di antara mereka berdua terkait jenis-jenis kemitraan yang bisa dilakukan.

Secara umum hasil negosiasi tersebut membantu masing-masing pihak dalam memenuhi kepentingannya. Pihak sekolah atau jurusan Teknik Mesin mendapatkan tempat pelatihan untuk guru dan murid dalam hal ini OJT guru, PKL dan magang siswa. Sementara itu, dari ketiga kegiatan tersebut, PT. YPTI mendapat bantuan dari pihak sekolah untuk memproduksi alat yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi ini tentunya didukung oleh kurikulum sekolah yang sudah disesuaikan dengan konten milik industri. Hal itu juga terjadi di jurusan TKR. Jurusan ini bekerjasama dengan PT. Krama Yudha Berlian salah satu ATPM Mitshubishi Indonesia.

Pihak jurusan TKR mendapatkan bantuan alat praktik, dan tempat pelatihan untuk guru dan murid. Secara tidak langsung bantuan yang diberikan oleh PT. Krama Yudha Berlian tersebut menjadikan pihak sekolah sebagai tempat pelatihan bagi calon tenaga kerjanya. Sehingga ketika melakukan rekrutmen tenaga kerja di SMKN 2 Yogyakarta, pihak industri dalam hal ini PT. Krama Yudha Berlian tidak perlu melakukan training lagi, karena proses tersebut sudah dijalankan oleh pihak sekolah. Ini merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pihak industri.

Selain pihak sekolah yang di dalamnya termasuk jurusan-jurusan yang ada dan pihak industri, siswa pun dalam praktik kemitraan ini juga mengambil keuntungan melalui PKL dan magang siswa serta rekrutmen tenaga kerja. Untuk dua program yang disebutkan di awal, siswa mendapatkan keuntungan berupa peningkatan kompetensi. Sementara untuk rekrutmen tenaga kerja biasanya siswa mendapatkan prioritas apabila mengikuti rekrutmen dari PT. YPTI dan PT. Krama Yudha Berlian.

Walaupun masing-masing aktor mendapatkan keuntungan, namun nyatanya masih ada aktor yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan masih ada aktor yang dirugikan karena manfaat yang didapatkannya sangat minim dan biaya yang dikeluarkannya cukup banyak. Karena di balik manfaat yang didapatkan tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar seperti waktu dan tenaga, guna mendapatkan kepercayaan dari pihak industri. Karena bagi pihak industri pemberian bantuan alat praktik merupakan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu pihak SMKN 2

⁵ *Op.cit*, Pak Maryuwono. 28/9/2018.

Yogyakarta, khususnya bagi jurusan TKR apabila ingin mendapatkan bantuan alat praktik, harus bisa memberikan jaminan bahwa dengan diberikannya bantuan dapat mempermudah PT. Krama Yudha Berlian dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Inilah bukti dari kekuasaan yang berlangsung negatif, dimana terjadi pola relasi yang eksploitatif dan dominatif. Pola tersebut tidak berjalan dengan cara represif, melainkan dengan manipulatif dan hegemonik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi yang tidak seimbang dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Relasi yang tidak seimbang tersebut ditunjukkan dari keuntungan yang didapatkan oleh dunia industri lebih besar dari pada yang didapatkan oleh pihak SMKN 2 Yogyakarta dan siswa. Relasi tersebut juga menggambarkan posisi antar aktor yang tidak setara. Dimana dunia industri sangat diuntungkan, sementara pihak SMKN 2 Yogyakarta dan siswa kurang diuntungkan.

Gambaran posisi antar aktor ini menunjukkan adanya dominasi dari dunia industri terhadap SMKN 2 Yogyakarta dan siswa. Dominasi yang hadir disebabkan oleh dua hal yaitu aturan yang dibuat Pemerintah dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang ditawarkan saat proses negosiasi. Berbagai aturan yang dibuat oleh Pemerintah menjadi salah satu penyebab dominasi yang dilakukan oleh dunia industri terhadap SMKN 2 Yogyakarta dan siswa. Pasalnya aturan-aturan tersebut memperluas ruang gerak dunia industri dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan.

Penyebab kedua dominasi yang dilakukan oleh dunia industri adalah perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang ditawarkan saat proses negosiasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan oleh dunia industri kepada pihak sekolah. Bantuan-bantuan tersebut tentunya menyebabkan pihak SMKN 2 Yogyakarta merasa membutuhkannya, karena beberapa jurusan memang memerlukan bantuan tersebut. Namun bukan berarti tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak sekolah dan siswa tidak dibutuhkan oleh dunia industri. Tawaran yang mereka berikan tentunya sangat penting, terutama guru dan kurikulum karena itu semua sangat berfungsi bagi dunia industri dalam menerapkan kompetensi yang mereka butuhkan di sekolah. Inilah yang disebut sebagai pola relasi kuasa hegemonik yang dilakukan oleh dunia industri terhadap pihak sekolah dalam praktik kemitraan.

KESIMPULAN

Kemitraan dalam pendidikan pada dasarnya merupakan upaya kolaborasi antara pemerintah dengan aktor-aktor di luar pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Partisipasi aktor di luar pemerintah tersebut menunjukkan, bahwa ada pemberian sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kepada aktor-aktor tersebut. Pemberian kewenangan tersebut nantinya diharapkan bisa memberikan perubahan yang cukup besar dalam hal pelayanan publik.

Keberhasilannya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya, membuat kemitraan ini semakin berkembang ke berbagai bidang. Maka tidak heran ketika di sektor pendidikan, model kemitraan sangat sering digunakan khususnya pada pendidikan kejuruan. Salah satu alasan kuat penggunaan kemitraan dalam pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan agar sesuai dengan kompetensi industri.

Walau dalam bentuk idealnya kerja sama tersebut diharapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, namun pada praktiknya masing-masing aktor yang menjalin kerja sama tersebut belum bisa banyak menyelesaikan masalah yang ada, tetapi mereka malah mengejar kepentingan pribadi dari pelaksanaan kemitraan ini. Baik pihak sekolah, dunia industri maupun masyarakat atau siswa memiliki rasionalitas dalam menjalani kemitraan ini.

Rasionalitas masing-masing aktor tersebut dapat kita lihat saat mereka memberikan tarawannya pada proses negosiasi. Rasionalitas tersebut dapat berbentuk materiil dan non-materiil seperti uang, sumber daya manusia, fasilitas pelatihan dan alat praktik tetapi juga bersifat non-materi seperti waktu, tenaga dan materi pelajaran atau kurikulum. Tetapi biaya dan manfaat yang bersifat materi dan non-materi tersebut tidak dimiliki oleh semua aktor.

Proses negosiasi tersebut berjalan saat di antara para aktor menentukan jenis-jenis kemitraan yang dapat dikategorikan dalam interaksi langsung dan tidak langsung. Hasil dari negosiasi tersebut adalah masing-masing pihak dapat memenuhi kepentingannya. Walaupun masing-masing aktor berhasil memenuhi kepentingannya, namun nyatanya masih ada aktor yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Inilah bukti dari kekuasaan yang berlangsung negatif, dimana terjadi pola relasi yang dominatif. Pola tersebut tidak berjalan dengan cara represif, melainkan dengan manipulatif dan hegemonik.

Dominasi yang hadir disebabkan oleh dua sebab yaitu aturan yang dibuat

Pemerintah dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang ditawarkan saat proses negosiasi. Inilah yang disebut sebagai pola relasi kuasa hegemonik yang dilakukan oleh dunia industri terhadap pihak sekolah dalam praktik kemitraan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi yang tidak seimbang dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Tidak adanya prinsip kesetaraan dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Inilah yang kemudian harus diperhatikan, khususnya bagi aktor-aktor yang terlibat dalam praktik kemitraan di SMKN 2 Yogyakarta. Karena prinsip kesetaraan merupakan syarat utama di dalam praktik kemitraan. Tanpa adanya prinsip tersebut, maka mengaburkan tujuan bersama yang telah disepakati secara bersama pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, S. (2017). *Relasi Kuasa Aktor Intermediary dan Pemerintah (Studi Kasus: Yayasan Satunama Yogyakarta)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bangs, J., et.al (2009). *Education International Task Force on Public-Private Partnership in Education: Public-Private Partnership In Education*. Published by Education International.
- Deliarinov. (2006). *Ekonomi Politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- De Angelis, R. (2014). *Quality In India Education : Public-Private Partnership and Grant-In-Aid-Schools*. Educate, Vol. 14, No. 2. 13-28.
- Edistya P., Nikko & Ali I. (2012). *Manajemen Pengembangan Kerjasama Antara Sekolah dan Dunia Usaha Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. Manajemen Pendidikan, Vol. 23, No. 5, Maret.439-444.
- Fatmawati. (2011). *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2. 91-101.
- Fennel, S. (2007). *Tilting at Windmills: Public-Private Partnership in Indian Education Today*. Contemporar Education Dailogue, Vol.4 No 2. 193-216.
- Galih R.N. P,. (2016). *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haliim, W. (2017). *Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013*. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 201-226.

- Khankarli, G.A & Battaglio, P. R (2008). *Toll Road, Politics, and Public-Public Partnership (The Case of Texas State Highway 121)*. Public Works Management & Policy, Vol. 13, Number 2.138-148.
- Kuntoro, S. (2010)*Kemitraan Sekolah. Workshop Strategi Pengembangan Mutu Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*.Prodi S2 Manajemen Pendidikan dan S3 Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohman, A & dkk. (2014). *Dinamika Relasi Politik Antara Otonomi Guru dan Dominasi Kekuasaan*. Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2 No. 2. 101-113.
- Sukmajati, M. (2014). *Politisi, Birokrat dan Reformasi Birokrasi*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 45. 106-125.
- Sulistiya, P, dkk. (2011). *Karnaval Caci Maki*. Yogyakarta: Eskpresi Buku.
- Thomas, O.A &Olufuwa, T. A. S. (2013).*Public-Private Partnership Management Of Higher Education In Nigeria*. Journal Of Education Review, Vol. 6, No. 1. 109-117.
- Verger, A. (2012). “*Framing and Selling Global Education Policy : The Promotion Of Public-Private Partnership For Education In Low-Income Contexts*”. Journal Of Education Policy, Vol. 27, No. 1.109-130.
- Wawancara dengan Kajur Teknik Mesin SMK Negeri 2 Yogyakarta, Pak Maryuwono (28/9/2018)
- Wawancara dengan Kajur Teknik Audio dan Video SMK Negeri 2 Yogyakarta, Pak Arief (23/9/2018)
- Wawancara dengan perwakilan Humas SMK Negeri 2 Yogyakarta, Pak Eka (18/9/2018)
